



# Indonesia Morowali Industrial Park

## Kebijakan Manajemen Tanggung Jawab Rantai Pasokan



Indonesia Morowali Industrial Park  
Disusun oleh Komite ESG dan Pembangunan Berkelanjutan

October 2024

## 1. Tujuan

Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (disingkat "IMIP," "kawasan," atau "kami") menyadari bahwa terlibat dalam eksplorasi, perdagangan, pengolahan, dan ekspor sumber daya mineral di "area yang dipengaruhi konflik dan berisiko tinggi" dapat memiliki risiko yang dapat menyebabkan dampak negatif. Kami juga menyadari bahwa kami memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, tidak memperburuk konflik, dan tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk mengadopsi dan secara luas menyebarkan konten dari "Panduan Manajemen Tanggung Jawab Rantai Pasokan Mineral Tiongkok" (Edisi Kedua) dan "Panduan Tanggung Jawab Rantai Pasokan untuk Bijih dari Area yang Dipengaruhi Konflik dan Berisiko Tinggi" (Edisi Ketiga) yang diterbitkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan akan memasukkannya ke dalam kontrak dan perjanjian yang ditandatangani dengan pemasok. Kami mematuhi, dan berharap pemasok juga mematuhi, ketentuan, inisiatif, dan pedoman dari "Sepuluh Prinsip Global Compact PBB," "Standar Tenaga Kerja Internasional," "Konvensi tentang Kerja Paksa," "Konvensi tentang Usia Minimum untuk Bekerja," "Konvensi Hak Anak," "Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Organisasi Buruh Internasional," "Konvensi Rio," "Perjanjian Paris," "Konvensi Keanekaragaman Hayati," "Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi," "Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat," dan "Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif."

## 2. Komitmen

Kebijakan ini memberikan referensi untuk seluruh proses rantai pasokan mineral yang melibatkan kegiatan pengadaan yang sensitif terhadap konflik serta meningkatkan kesadaran risiko bagi pemasok. Kami berkomitmen untuk tidak terlibat dalam kegiatan apa pun yang dapat membiayai konflik dan berjanji untuk mematuhi **resolusi sanksi** terkait dari PBB dan pihak berwenang lainnya.

Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko berikut dalam praktik operasi rantai pasokan:

## (1) Pelanggaran serius yang terkait dengan eksplorasi, pengangkutan, atau perdagangan mineral:

Saat melakukan pengadaan atau kegiatan usaha di "area yang dipengaruhi konflik dan berisiko tinggi," kami tidak akan mentolerir dan tidak akan mendapatkan keuntungan, membantu, mendukung, atau memfasilitasi pihak mana pun dalam melakukan:

- a. Bentuk penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;
- b. Segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Kerja paksa atau kerja wajib diartikan sebagai kerja atau layanan yang dilakukan oleh individu yang tidak bersedia, di bawah ancaman hukuman;
- c. Bentuk terburuk dari pekerja anak;
- d. Tindakan lain yang secara serius melanggar dan menginjak-injak hak asasi manusia, seperti kekerasan seksual yang meluas;
- e. Kejahatan perang atau pelanggaran berat lainnya terhadap hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida.

Strategi mitigasi risiko:

Jika kami memiliki alasan yang wajar untuk percaya bahwa risiko tersebut ada, yaitu jika pemasok hulu sedang melakukan pengadaan dari pihak mana pun yang melakukan pelanggaran serius yang disebutkan di atas atau memiliki keterkaitan dengan pihak tersebut, kami akan segera menghentikan atau mengakhiri kerjasama dengan pemasok tersebut.

## (2) Mengenai Dukungan Langsung atau Tidak Langsung kepada Kelompok Bersenjata Non-Negara:

Kami tidak akan mentolerir adanya dukungan langsung atau tidak langsung kepada kelompok bersenjata non-negara melalui eksplorasi, pengangkutan, perdagangan, pemrosesan, atau ekspor mineral. Dukungan "langsung atau tidak langsung" kepada kelompok bersenjata non-negara melalui eksplorasi, pengangkutan, perdagangan, pemrosesan, atau ekspor mineral, tetapi tidak terbatas pada, pembelian mineral dari kelompok bersenjata non-negara atau pihak terkait mereka, melakukan pembayaran kepada mereka, atau memberikan dukungan logistik atau peralatan dengan cara lain<sup>i</sup>. Kelompok bersenjata atau pihak terkait tersebut:

a. Mengendalikan lokasi tambang secara ilegal, atau dengan cara lain mengendalikan rute transportasi, titik perdagangan mineral, dan pelaku di hulu dalam rantai pasokan <sup>ii</sup>.

b. Memungut pajak secara ilegal atau melakukan pemerasan di pintu masuk tambang, sepanjang rute transportasi, atau di titik perdagangan mineral <sup>iii</sup>.

c. Memungut pajak atau melakukan pemerasan secara ilegal kepada perantara, perusahaan ekspor, atau pedagang internasional.

Strategi mitigasi risiko:

Jika kami memiliki alasan untuk percaya bahwa pemasok hulu sedang melakukan pengadaan dari pihak mana pun yang memberikan dukungan langsung atau tidak langsung kepada kelompok bersenjata non-negara, kami akan segera menghentikan atau mengakhiri kerjasama dengan pemasok tersebut.

### (3) Tentang Keamanan Bersenjata Publik atau Swasta

Kami menolak memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada individu atau entitas yang secara ilegal menguasai lokasi tambang, jalur transportasi, atau yang terlibat dalam rantai pasokan hulu, dalam hal pemungutan pajak atau meminta uang atau mineral secara ilegal di pintu masuk lokasi tambang, sepanjang jalur transportasi, atau di titik perdagangan mineral, serta pemungutan pajak atau pemerasan terhadap perantara, perusahaan ekspor, atau pelaku perdagangan internasional <sup>iv</sup>.

Kami mengakui bahwa peran angkatan keamanan publik atau swasta di lokasi tambang dan/atau area sekitarnya dan/atau sepanjang jalur transportasi adalah untuk menjaga supremasi hukum, termasuk perlindungan hak asasi manusia, melindungi penambang, menjaga keamanan peralatan dan fasilitas, serta melindungi lokasi tambang atau jalur transportasi agar kegiatan penambangan dan perdagangan yang sah tidak terganggu.

Jika ada kontrak yang ditandatangani antara kami atau perusahaan dalam rantai pasokan kami dengan angkatan keamanan publik atau swasta, kami berkomitmen atau akan menetapkan bahwa angkatan keamanan tersebut harus diakui sesuai dengan standar internasional dan dokumen panduan yang berlaku untuk pengelolaan angkatan keamanan publik atau swasta. Secara khusus, kami

akan mendukung atau mengambil langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan penyaringan, memastikan bahwa individu atau entitas angkatan keamanan yang telah diketahui melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius tidak dipekerjakan <sup>v</sup>.

Kami akan mendukung atau mengambil langkah-langkah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat atau daerah, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama menemukan solusi yang layak guna meningkatkan transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas biaya keamanan angkatan publik.

Kami akan mendukung atau mengambil langkah-langkah untuk berinteraksi dengan pemerintah setempat, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil, guna menghindari atau meminimalkan dampak negatif dari kehadiran angkatan keamanan publik atau swasta di lokasi tambang terhadap kelompok rentan, terutama dampak negatif bagi penambang skala kecil, dalam situasi di mana mineral dalam rantai pasokan diperoleh melalui cara penambangan kecil atau skala kecil.

Strategi mitigasi risiko:

Jika kami menemukan adanya risiko semacam itu, kami akan segera **meny-**usun, mengadopsi, dan melaksanakan rencana manajemen risiko bagi pemasok hulu dan pihak berkepentingan lainnya sesuai dengan posisi spesifik perusahaan dalam rantai pasokan, sehingga risiko memberikan dukungan langsung atau tidak langsung kepada angkatan keamanan publik atau swasta dapat dibatasi atau diminimalkan <sup>vi</sup>. Jika rencana manajemen risiko tidak menunjukkan hasil setelah enam bulan diterapkan, kami akan menghentikan sementara atau mengakhiri kerja sama dengan pemasok hulu <sup>vii</sup>. Kami akan mengambil langkah yang sama jika terdapat kemungkinan adanya pelanggaran terhadap isi **paragraf 8 dan 9 di**

#### **(4) Mengenai suap dan penerimaan suap serta pernyataan palsu yang menipu tentang asal usul mineral:**

Kami tidak akan mengajukan, berjanji, melakukan, atau meminta suap, dan kami menolak godaan untuk melakukan suap demi menyembunyikan atau memalsukan asal usul mineral, serta untuk melaporkan secara tidak benar pajak,

biaya, dan royalti yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah terkait kegiatan penambangan, perdagangan, pengolahan, transportasi, dan ekspor mineral.

#### **(5) Mengenai pencucian uang:**

Jika kami memiliki alasan untuk percaya bahwa terdapat risiko pencucian uang yang disebabkan oleh pemungutan pajak atau pemerasan secara ilegal terhadap mineral yang diperoleh dari penambangan, perdagangan, pengolahan, transportasi, atau ekspor di pintu masuk lokasi tambang, sepanjang jalur transportasi, atau di tempat perdagangan mineral oleh pemasok hulu, kami akan mendukung atau mengambil langkah-langkah untuk berkontribusi dalam menghapuskan tindakan pencucian uang secara efektif.

#### **(6) Mengenai pajak, biaya, dan royalti yang dibayarkan kepada pemerintah:**

Kami akan memastikan untuk membayar semua pajak, biaya, dan royalti yang sah yang terkait dengan penambangan, perdagangan, dan ekspor mineral di daerah yang terdampak konflik dan berisiko tinggi kepada pemerintah. Kami juga berkomitmen untuk mengungkapkan pembayaran tersebut sesuai dengan persyaratan keterbukaan informasi mengenai pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, sesuai dengan lokasi perusahaan dalam rantai pasokan.

#### **(7) Mengenai perlindungan lingkungan:**

Kami mengakui, meminta, dan mendukung pemasok untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh, meminimalkan produksi limbah dan emisi gas berbahaya, menutup tambang secara permanen dan memulihkan lokasi tambang, melakukan konservasi sumber daya dan daur ulang limbah, menerapkan manajemen risiko lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, berusaha untuk terus meningkatkan manajemen kinerja lingkungan, dan secara efektif mengompensasi dampak residual pada pengelolaan lingkungan dan jejak ekologis selama siklus hidup penambangan.

### (8) Mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia:

Kami mengakui, dan meminta pemasok untuk tidak mempekerjakan anak di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan setempat di lokasi pemasok; tidak mendiskriminasi karyawan dalam hal perekrutan, pekerjaan, pelatihan, dan perlakuan kerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, kewarganegaraan, status sosial, atau alasan lainnya; mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta standar industri terkait jam kerja, istirahat, dan cuti; menjamin hak kebebasan berserikat karyawan, melarang atau menghalangi pemilihan perwakilan karyawan, pembentukan atau bergabung dengan serikat pekerja, serta melakukan negosiasi dua arah antara pekerja dan manajemen.

### (9) Mengenai kesehatan dan keselamatan kerja:

Kami mengakui, dan meminta pemasok untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk mencegah cedera, kecelakaan, dan penyakit profesional di tempat kerja; harus menjelaskan dan memberitahu karyawan tentang potensi paparan elemen beracun di tempat kerja dalam jangka pendek dan panjang, seperti debu mineral (misalnya, mineral yang dapat menyebabkan penyakit asbestosis atau silikosis) dan partikel lainnya, asap diesel, gas, air garam, serta kebisingan berfrekuensi tinggi yang dapat menyebabkan penyakit kronis yang tidak dapat dipulihkan; ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan dari pandemi, gempa bumi, kebakaran, longsor, runtuh, dan batu jatuh.

### (10) Mengenai etika bisnis:

Kami mengakui, dan meminta pemasok untuk memperoleh izin, hak sewa, dan hak franchise tambang dengan cara yang sah dan sesuai aturan. Dalam proses ini, tidak boleh ada suap atau bentuk korupsi lainnya; menyusun mekanisme kepatuhan yang baik untuk mencegah, menghindari, dan menangani risiko korupsi dan suap; harus membayar pajak sesuai dengan hukum dan peraturan setempat, serta tidak terlibat dalam penghindaran pajak; tidak boleh mengganggu ketertiban pasar yang adil, termasuk tindakan monopoli atau persaingan tidak sehat; jika pemasok berinvestasi atau beroperasi di negara yang mengharuskan transparansi

atau publikasi informasi tentang industri ekstraktif, mereka harus mematuhi persyaratan tersebut dan mengungkapkan informasi tentang investasi dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

### (11) Mengenai tanggung jawab sosial:

Kami mengakui, dan meminta pemasok untuk menghormati dan melindungi budaya serta warisan masyarakat lokal dan masyarakat adat, serta tidak merusak budaya tradisional setempat; harus melindungi kehidupan dan kesehatan penduduk yang tinggal di dekat lokasi operasi, serta publik yang terkena risiko atau dampak dari aktivitas operasional. Harus menghindari penambangan di lokasi warisan budaya, situs geologis, kawasan hutan lindung, kawasan rawa, dan kawasan perlindungan satwa liar yang diakui secara lokal dan internasional, kecuali diizinkan oleh hukum setempat. Selain itu, pemasok tidak boleh menga-kuisisi bahan baku dari daerah yang terkena sanksi internasional (termasuk tetapi tidak terbatas pada sanksi oleh PBB, Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat).

#### Strategi Mitigasi Risiko:

Berdasarkan posisi perusahaan dalam rantai pasokan, kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemasok, lembaga pemerintah pusat atau daerah, organisasi internasional, masyarakat sipil, serta pihak ketiga yang terkena dampak sesuai kebijaksanaan, dengan tujuan untuk mengambil langkah-langkah signifikan dalam jangka waktu yang wajar untuk mencegah atau mengurangi risiko yang berdampak negatif dan memperbaiki atau melacak kinerja.

Jika langkah-langkah pengurangan risiko tidak berhasil, kami akan sementara menghentikan atau mengakhiri kerjasama dengan pemasok hulu. Untuk risiko yang perlu dikurangi setelah penerapan rencana manajemen risiko, kami akan melakukan evaluasi risiko tambahan.

Jika rencana manajemen risiko tidak menunjukkan hasil yang jelas dalam waktu enam bulan, dan risiko suap, penerimaan suap, pernyataan palsu mengenai asal-usul mineral, pencucian uang, serta kewajiban membayar pajak, biaya, dan royalti kepada pemerintah tidak dapat ditekan atau dikurangi, kami akan sementara menghentikan atau memutuskan kerjasama dengan pemasok selama minimal tiga bulan. Selama penghentian kerjasama sementara tersebut, kami akan merevi-



si rencana manajemen risiko dan menetapkan tujuan kinerja yang harus dicapai sebelum hubungan perdagangan dapat dipulihkan.

Kawasan industri akan mengintegrasikan kebijakan ini ke dalam sistem manajemen kawasan dan tanggung jawab departemen terkait dengan prinsip perbaikan berkelanjutan. Kebijakan ini juga berlaku untuk semua pemasok kawasan industri, dan kawasan industri akan mengambil langkah aktif untuk menyampaikan kebijakan ini kepada pemasok. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan akan diumumkan di situs web resmi kawasan industri.

- i. “Pihak terkait” termasuk pedagang, pedagang besar, perantara, dan pihak lain dalam rantai pasokan yang bekerja secara langsung dengan kelompok bersenjata untuk memfasilitasi ekstraksi, perdagangan, dan pembuangan mineral.
- ii. “Kontrol” atas tambang, rute transportasi, tempat di mana mineral diperdagangkan, dan pelaku di hulu dalam rantai pasokan berarti i) pengawasan kegiatan pertambangan, termasuk otorisasi akses ke tambang dan/atau koordinasi penjualan oleh perantara hilir, eksportir, atau pedagang internasional; ii) penggunaan segala bentuk paksaan atau kekerasan dalam ekstraksi, transportasi, perdagangan, atau penjualan mineral; dan iii) penggunaan segala bentuk kekuatan atau paksaan dalam ekstraksi, transportasi, perdagangan, atau penjualan mineral. ii) penggunaan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib dalam ekstraksi, pengangkutan, perdagangan, atau penjualan mineral; atau iii) memegang posisi kepemimpinan atau manajemen, atau kepentingan kepemilikan yang menguntungkan atau kepemilikan lainnya di perusahaan hulu atau tambang.
- iii. **Pemerasan**” dari tambang, rute transportasi, tempat di mana mineral diperdagangkan, atau perusahaan hulu berarti permintaan, di bawah ancaman kekerasan atau cara lain, uang atau mineral yang tidak dibayar secara sukarela oleh orang yang menjadi sasaran permintaan tersebut, biasanya sebagai imbalan atas izin untuk menambang, menggunakan rute transportasi, atau mengangkut, membeli, atau menjual mineral.
- iv. Istilah “dukungan langsung atau tidak langsung” dalam konteks ini tidak merujuk pada bentuk dukungan yang sah, yang mencakup pajak, biaya, dan/atau royalti yang sah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah negara tempat mereka beroperasi.
- v. Contohnya termasuk dokumen panduan internasional seperti “Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia.”
- vi. Jika terjadi force majeure seperti tsunami, gempa bumi, kebakaran, epidemi, perang, dll. selama pelaksanaan program risiko, jangka waktu dapat disesuaikan, tetapi penjelasan tertulis tentang situasi tersebut akan diberikan.
- vii. Untuk risiko yang perlu dikurangi setelah penerapan program manajemen risiko, perusahaan juga harus melakukan penilaian risiko. Jika rencana manajemen risiko belum mencapai hasil yang jelas dalam waktu enam bulan dan risiko memberikan dukungan langsung atau tidak langsung kepada pasukan keamanan publik atau swasta belum dapat diatasi atau dikurangi, perusahaan harus menanggung sementara kerja sama dengan pemasok untuk jangka waktu setidaknya tiga bulan dan merevisi rencana manajemen risiko pada saat yang sama dengan penangguhan sementara kerja sama tersebut, dengan menetapkan tujuan kinerja yang harus dicapai dengan perbaikan yang dilakukan sebelum dimulainya kembali hubungan kerja sama.



# Indonesia Morowali Industrial Park

## Responsible Supply Chain Management Policy



Indonesia Morowali Industrial Park

By Sustainability Committee Supply Chain Due Diligence Management Office

October 2024

## Article 1 Purpose

---

Indonesia Morowali Industrial Park (hereinafter referred to as "IMIP", "Park" or "We") recognizes the risks of significant adverse impacts which may be associated with extracting, trading, handling and exporting minerals from conflict-affected and high-risk Areas, as well as our obligations to respect human rights and not to contribute to conflict and not to adversely affect the environment and society, We commit to adopt and widely disseminate the Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains(Second Edition) and OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (Third Edition) and incorporate relevant requirements from these two guidance into contracts and/or agreements with our suppliers. We adhere to and require our suppliers to adhere to regulations, initiatives and guideline, such as: The Ten Principles of the UN Global Compact, International Labour Standards, Forced Labor Convention, Minimum Age Convention (No. 138), Convention on the Rights of the Child, The Rio Declaration, The Paris Agreement, Convention on Biological Diversity, United Nations Convention Against Corruption, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples(UNDRIP), The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), etc.

## Article 2 Ground

---

This policy is intended to provide a common reference about procurement activities related conflicts for all suppliers throughout the entire mineral supply chain to raise risk awareness. We commit to refraining from any action which contributes to the financing of conflict and we commit to comply with relevant United Nations sanctions resolutions.

We commit to identify and manage following risks in out supply chain management practice:

## **(1) Regarding serious abuses associated with the extraction, transport or trade of minerals**

While sourcing from, or operating in, conflict-affected and high-risk areas, we will neither tolerate nor by any means profit from, contribute to, assist with or facilitate the commission by any party of:

- a. any forms of torture, cruel, inhuman and degrading treatment;
- b. any forms of forced or compulsory labour, which means work or service which is exacted from any person under the meance of penalty and for which said person has not offered himself voluntarily.
- c. The worst form of child labour;
- d. Other gross human rights violations and abuses such as widespread sexual violence;
- e. War crimes or other serious violations of international humanitarian law, crimes against humanity or genocide.

## **(2) Regarding serious abuses associated with the extraction, transport or trade of minerals**

While sourcing from, or operating in, conflict-affected and high-risk areas, we will neither tolerate nor by any means profit from, contribute to, assist with or facilitate the commission by any party of:

- a. any forms of torture, cruel, inhuman and degrading treatment;
- b. any forms of forced or compulsory labour, which means work or service which is exacted from any person under the meance of penalty and for which said person has not offered himself voluntarily.
- c. The worst form of child labour;
- d. Other gross human rights violations and abuses such as widespread sexual violence;
- e. War crimes or other serious violations of international humanitarian law, crimes against humanity or genocide.

Regarding the risk management

We will immediately suspend or discontinue engagement with upstream suppliers where we identify a reasonable risk that they are sourcing from, or linked to, any party committing serious abuses as defined above.

### (3) Regarding public or private security forces

We will not provide any direct or indirect support to public or private security forces who illegally control mine sites, transportation routes and upstream actors in the supply chain; illegally tax or extort money or minerals at point of access to mine sites, along transportation routes or at points where minerals are traded or illegally tax or extort intermediaries, export companies or international traders.

We recognize that the role of public or private security forces at the mine sites and/or surrounding areas and/or along transportation routes should be solely to maintain the rule of law, including safeguarding human rights, providing security to mine workers, equipment and facilities, and protecting the mine site or transportation routes from interference with legitimate extraction and trade.

Where we or any company in our supply chain contract public or private security forces, we commit to or we will require that such security forces will be engaged in accordance with the Voluntary Principles on Security and Human Rights. In particular, we will support or take steps, to adopt screening policies to ensure that individuals or units of security forces that are known to have been responsible for gross human rights abuses will not be hired.

We will support efforts, or take steps, to engage with central or local authorities, international organizations and civil society organizations to contribute to workable solutions on how transparency, proportionality and accountability in payments made to public security forces for the provision of security could be improved.

We will support efforts, or take steps, to engage with local authorities, international organizations and civil society organizations to avoid or minimize the exposure of vulnerable groups, in particular, artisanal miners where minerals in the supply chain are extracted through artisanal or small-scale mining, to adverse impacts associated with the presence of security forces, public or private, on mine sites.

#### Regarding the risk management

In accordance with the specific position of the company in the supply chain, we will immediately devise, adopt and implement a risk management plan with upstream suppliers and other stakeholders to prevent or mitigate the risk of direct or indirect support to public or private security forces, as identified in 2.1,

where we identify that such a reasonable risk exists. In such cases, we will suspend or discontinue engagement with upstream suppliers after failed attempts at mitigation within six months from the adoption of the risk management plan. Where we identify a reasonable risk of activities inconsistent with paragraphs 8 and 9, we will respond in the same vein.

#### **(4) Regarding bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of minerals**

We will not offer, promise, give or demand any bribes, and will resist the solicitation of bribes to conceal or disguise the origin of minerals, to misrepresent taxes, fees and royalties paid to governments for the purposes of mineral extraction, trade, handling, transport and export.

#### **(5) Regarding money laundering**

We will support efforts, or take steps, to contribute to the effective elimination of money laundering where we identify a reasonable risk of money-laundering resulting from, or connected to, the extraction, trade, handling, transport or export of minerals derived from the illegal taxation or extortion of minerals at points of access to mine sites, along transportation routes or at points where minerals are traded by upstream suppliers.

#### **(6) Regarding the payment of taxes, fees and royalties due to governments**

We will ensure that all taxes, fees, and royalties related to mineral extraction, trade and export from conflict-affected and high-risk areas are paid to governments and, in accordance with the company's position in the supply chain, we commit to disclose such payments in accordance with the principles set forth under the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI).

Regarding the risk management

In accordance with the specific position of the company in the supply chain, we commit to engage with suppliers, central or local governmental authorities, international categorizations, civil society and affected third parties, as appropriate, to improve and track performance with a view to preventing or mitigating risks of adverse impacts through measurable steps taken in reasonable time-scales. We will suspend or discontinue engagement with upstream suppliers after failed at mitigation.

If within six months from the adoption of the risk management plan there is no significant measurable improvement to prevent or mitigate the risks of bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of minerals, money-laundering and payment of taxes, fees and royalties to governments, companies should suspend or discontinue engagement with the supplier for a minimum of three months. Suspension may be accompanied by a revised risk management plan, stating the performance objectives for progressive improvement that should be met before resuming the trade relationship.

### **(7) Regarding environmental protect**

We recognize, require and support suppliers to conduct environmental assessments, therefore minimizing waste generation and hazardous emissions, rehabilitating mine sites that are permanently closed mine, conserving resources and recycling wastes, implementing environmental risk management, promoting biodiversity, striving for continuous improvement in environmental performance management, and effectively compensating for residual impacts on environment and ecological footprints over the life-cycle of mining.

### **(8) Regarding respecting human rights**

We recognize, and require suppliers must not employ children below the minimum working age regulated by local laws in the supplier's location; must not discriminate against employees on the basis of race, color, sex, religion, political affiliation, nationality and social status, or any other reason in recruitment, work,



vocational training, and employment treatment; and must comply with applicable laws, regulations and industry standards regarding hours of work and the requirements for rest and vacation; Must ensure employees' rights to freedom of association, prohibit or impede employees from electing employee representatives, forming or joining labor unions, and engaging in bilateral labor-management negotiations;

### **(9) Regarding occupational health and safety**

We recognize, and require suppliers must take practical actions to avoid employees' injuries and even death, incidents and occupational illnesses in workplace; Must identify and inform employees about long-term exposure to potential toxic elements in the workplace such as: minerals that cause asbestosis or silicosis and other particles, diesel fumes, gas, brine, high decibel noise, etc. that may cause workers to suffer from chronic occupational diseases that cannot be recovered; Epidemic, earthquake, fire, debris flow, collapse, rock fall and other threats to the health and safety of employees;

### **(10) Regarding occupational health and safety**

We recognize and require suppliers to legally obtain mining permits, leases, concessions, etc.. In the process of applying for certifications above, there shall be no bribery, corruption or other similar activities; Develop and improve compliance mechanisms to prevent, avoid and deal with the risks of corruption, bribery and other similar acts; Taxes must be paid in accordance with local laws and regulations, and there must be no tax evasion; They shall not disturb the fair market competition and not engage in monopoly, vicious competition and other acts; Suppliers must disclose their investments and tax payments to governments as required, if investing or operating in countries that require Extractive Industries Transparency Initiative.

## (11) Regarding social responsibilities

We recognize and require suppliers to respect and protect the culture and heritage of local people and indigenous people, and not to compromise the traditional culture of local people; The life and health of the local people around sites for business operation and the public exposed to the risks or effects arising from the business activities must be protected. Local and internationally recognized and designated cultural heritage sites, geological sites, forest reserves, wetland reserves, wildlife reserves, etc. must not be exploited (except where permitted by local law). Meanwhile, suppliers shall not purchase raw materials from areas subject to international sanctions (including but not limited to the United Nations, the European Union, the United Kingdom and the United States).

### Regarding the risk management

If we find that such risks (2.7-2.11) exist to a certain extent, we will immediately develop, adopt and implement a risk management plan for upstream suppliers and other stakeholders based on the company's specific position in the supply chain so that risks of environmental damage, human rights abuses, and unethical business practices can be prevented or mitigated. If within six months from the adoption of the risk management plan, there is no significant measurable improvement to prevent or mitigate risks, we will temporarily suspend or terminate the engagement with upstream suppliers.

The Park will incorporate this policy into the our management system and the responsibilities of all relevant departments based on the principle of continuous improvement. The policy also applies to all suppliers of the Park. The Park will take active measures to pass the policy to suppliers, and the policy will come into effect from the date of publication and will be published on the official website of the Park.

## (11) Regarding social responsibilities

- i. "Pihak terkait" termasuk pedagang, pedagang besar, perantara, dan pihak lain dalam rantai pasokan yang bekerja secara langsung dengan kelompok bersenjata untuk memfasilitasi ekstraksi, perdagangan, dan pembuangan mineral.
- ii. "Kontrol" atas tambang, rute transportasi, tempat di mana mineral diperdagangkan, dan pelaku di hulu dalam rantai pasokan berarti i) pengawasan kegiatan pertambangan, termasuk otorisasi akses ke tambang dan/atau koordinasi penjualan oleh perantara hilir, eksportir, atau pedagang internasional; ii) penggunaan segala bentuk paksaan atau kekerasan dalam ekstraksi, transportasi, perdagangan, atau penjualan mineral; dan iii) penggunaan segala bentuk kekuatan atau paksaan dalam ekstraksi, transportasi, perdagangan, atau penjualan mineral. ii) penggunaan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib dalam ekstraksi, pengangkutan,

- perdagangan, atau penjualan mineral; atau iii) memegang posisi kepemimpinan atau manajemen, atau kepentingan kepemilikan yang menguntungkan atau kepemilikan lainnya di perusahaan hulu atau tambang.
- iii. “Pemerasan” dari tambang, rute transportasi, tempat di mana mineral diperdagangkan, atau perusahaan hulu berarti permintaan, di bawah ancaman kekerasan atau cara lain, uang atau mineral yang tidak dibayar secara sukarela oleh orang yang menjadi sasaran permintaan tersebut, biasanya sebagai imbalan atas izin untuk menambang, menggunakan rute transportasi, atau mengangkut, membeli, atau menjual mineral.
  - iv. Istilah “dukungan langsung atau tidak langsung” dalam konteks ini tidak merujuk pada bentuk dukungan yang sah, yang mencakup pajak, biaya, dan/atau royalti yang sah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah negara tempat mereka beroperasi.
  - v. Contohnya termasuk dokumen panduan internasional seperti “Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia.”
  - vi. Jika terjadi force majeure seperti tsunami, gempa bumi, kebakaran, epidemi, perang, dll. selama pelaksanaan program risiko, jangka waktu dapat disesuaikan, tetapi penjelasan tertulis tentang situasi tersebut akan diberikan.
  - vii. Untuk risiko yang perlu dikurangi setelah penerapan program manajemen risiko, perusahaan juga harus melakukan penilaian risiko. Jika rencana manajemen risiko belum mencapai hasil yang jelas dalam waktu enam bulan dan risiko memberikan dukungan langsung atau tidak langsung kepada pasukan keamanan publik atau swasta belum dapat diatasi atau dikurangi, perusahaan harus menanggung sementara kerja sama dengan pemasok untuk jangka waktu setidaknya tiga bulan dan merevisi rencana manajemen risiko pada saat yang sama dengan penangguhan sementara kerja sama tersebut, dengan menetapkan tujuan kinerja yang harus dicapai dengan perbaikan yang dilakukan sebelum dimulainya kembali hubungan kerja sama.



# 印尼莫罗瓦利工业园区 供应链尽责管理政策



印尼莫罗瓦利工业园区  
ESG与可持续发展委员会 编制

二零二四年十月

## 第一条 目的

印尼莫罗瓦利工业园区[此处的“印尼莫罗瓦利工业园区”指：印尼莫罗瓦利工业园区内的所有冶炼企业。](以下简称“IMIP”，“园区”或“我们”)认识到在“受冲突影响和高风险区域”从事矿产资源开采、交易、加工、出口存在可能造成不利影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不助长冲突、不对环境和社会产生不利影响的义务，我们承诺采纳并广泛传播《中国矿产供应链尽责管理指南》(第二版)、《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》(第三版)相关内容，并将其纳入到与供应商签订的合同和协议之中。我们遵守，也希望供应商遵守《联合国全球契约十项准则》《国际劳工标准》《强迫劳动公约》《最低工作年龄公约》《儿童权利公约》《国际劳工组织安全与健康实施准则》《里约公约》《巴黎协定》《生物多样性公约》《联合国反腐败公约》《联合国土著人民权利宣言》和《采掘业透明度倡议》等规定、倡议和准则。

## 第二条 承诺

这一政策为矿产供应链全过程涉及冲突敏感的采购活动以及供应商提高风险意识提供参考。我们承诺不从事任何会为冲突提供资助的活动，承诺遵守联合国等相关制裁决议。

我们承诺在供应链运营实践中识别和管理以下风险：

### (一) 与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权行为：

在“受冲突影响和高风险区域”开展采购或经营活动时，我们既不会容忍也不会以任何方式获利于、帮助、协助或便利任何一方实施：

- a.任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- b.任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何

个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；

- c.最恶劣形式的童工；
- d.其他严重侵犯和践踏人权的的行为,如普遍的性暴力行为；
- e.战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为,反人类罪或种族灭绝罪。

风险缓解策略：

如果我们有合理理由认为该风险存在,即上游供应商正从实施上述严重侵权行为任何一方进行采购或与该方有关联,我们将立即中止或终止与该供应商的合作。

## (二) 关于直接或间接支持非国家武装团体

我们不会容忍任何通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供“直接或间接的支持”包括且不限于从非国家武装团体或其关联方<sup>iii</sup>购买矿产,向其进行付款,或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

- a.非法控制矿址,或以其他方式控制运输路线、矿产交易点以及供应链的上游行为主体<sup>iii</sup>;并/或
- b.在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或者勒索钱财或矿产<sup>iv</sup>;并/或
- c.对中间商、出口企业、或国际贸易者非法征税或勒索。

风险缓解策略：

如果我们有理由认为,上游供应商从向非国家武装团体提供直接或间接支持任何一方进行采购或与之存在关系,我们将立即中止或终止与该供应商的合作。

## (三) 关于公共或私人安全武装

我们杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游行为主体,在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或索要钱财或矿产,或者向中间商、出口企业或国际贸易者非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。<sup>v</sup>

我们认可,矿址及/或其周边地区以及/或运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治,包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受干扰。

在我们或我们供应链上的任何企业与公共或私人安全武装签订了合约的情况下,我们承诺或者将规定,这类安全武装需被公认的处理公共或私人安全武装的国际标准和指导性文件所认可<sup>vi</sup>。尤其是,我们将会支持或采取措施运用筛查政策,确保已知的实施过严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用。

我们将支持或采取措施与中央或地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作,共同为如何提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性找到可行的解决方案。

我们将支持或采取措施与当地政府、国际组织和民间社会组织开展互动,避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来的负面影响,尤其是对小作坊矿工的负面影响,在这种情况下,供应链上的矿产是通过小作坊或小规模采矿的方式开采出来的。

#### 风险缓解策略:

如果我们发现在一定程度上存在此类风险,将根据企业在供应链上所处的具体位置,立即制定、采用和实施上游供应商及其他利益相关方风险管理计划<sup>vii</sup>,从而使为公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险得到遏制或降低。如果风险管理计划实施六个月未起作用,我们将暂时中止或终止与上游供应商的合作。<sup>viii</sup>我们发现在一定程度上有可能存在有违2.3中第4段和第5段内容的情况下,将采取同样的应对措施。

#### (四) 关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述

我们不会提出、承诺、进行或索要任何贿赂, 并且抵制诱惑, 不会为了掩盖或伪造矿产原产地, 虚报矿产开采、贸易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。<sup>ix</sup>

#### (五) 关于洗钱

如果我们有理由认为, 存在因开采、贸易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线、或上游供应商矿产交易地进行非法征税或勒索而得的矿产所引起或与之相关的洗钱风险, 我们将支持或采取措施, 为有效消除洗钱行为做出贡献。

#### (六) 关于向政府支付的税收、费用及特许费

我们将确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿石开采、贸易、出口相关的合法税收、费用和特许费, 并且承诺根据企业在供应链上所处位置依照所在国关于向政府部门缴纳的税费信息公开的要求对此类支付进行披露。

##### 风险缓解策略:

根据企业在供应链上所处的具体位置, 我们承诺与供应商、中央或地方政府机关、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情进行合作, 本着在合理的时间跨度内采取显著措施防范或降低有负面影响的风险的目的, 对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用的, 我们将暂时中止或终止与上游供应商的合作。对采用风险管理计划后需要降低的风险, 我们将额外进行风险评估。

若风险管理计划六个月内未取得明显效果, 行贿受贿及对矿产产地进行欺诈性失实陈述、洗钱、以及向政府缴纳税款、费用、特许费等行为的风险未能得到遏制或降低的话, 我们将暂时停止或中断与供应商的合作, 时间至少是三个月, 并在暂时中止合作的同时对风险管理计划进行修订, 阐明贸易关系恢复之前改进工作所应达到的绩效目标。



## (七) 关于环境保护

我们认可,也要求并支持供应商开展彻底的环境影响评价,最大程度减少废物产生和有害气体排放,对永久关闭矿山并对矿址进行修复,进行资源保护与废物回收利用,实施环境风险管理,保护生物多样性,努力持续改进环境绩效管理,有效地补偿在采矿生命周期中对环境管理和生态足迹造成的残余影响;

## (八) 关于尊重人权

我们认可,也要求供应商必须不得雇佣低于供应商所在地当地法律法规规定的最低工作年龄的儿童;不得在招聘、工作、职业培训及雇佣待遇中,因种族、肤色、性别、宗教、政治倾向国籍、社会地位或其他原因而歧视员工;必须遵守适用的法律法规及行业标准中关于工时和休息、休假的要求;必须保障员工的结社自由权利,禁止或阻碍员工选举员工代表、成立或加入工会,以及进行劳资双边协商;

## (九) 关于职业健康与安全

我们认可,也要求供应商必须采取切实措施,避免工作场所伤亡、事故与职业疾病;必须明确和告知员工工作场所中长期接触潜在的有毒元素,比如:矿物粉尘(例如:导致石棉沉着病或矽肺的矿物)和其他颗粒、柴油烟气、瓦斯、卤水,高分贝噪声等可能导致工人患上不可恢复的慢性职业病;疫情、地震、火灾、泥石流、塌陷、落石等对员工人身健康安全的威胁;

## (十) 关于商业道德

我们认可,也要求供应商必须以合法、规范的途径获取矿区许可、租赁权、特许经营权等。在此过程中,不得存在贿赂及其他形式的腐败行为;制定完善合规机制预防、避免以及处理易等腐败、行贿等类似行为的风险;必须按照所在地法律法规缴纳税费,不得存在偷税漏税的行为;不得扰乱市场公正秩序,存在垄断、恶性竞争等行为;供应

商如在对采掘业透明度或信息公开提出要求的国家投资或经营, 必须按照其要求公开投资和向政府缴纳税收的情况。

### (十一) 关于社会责任

我们认可, 也要求供应商必须尊重、保护当地人和原住民文化和遗产, 不得损害当地人传统文化; 必须保护经营场所附近居民的生命及健康, 以及受到因经营活动所产生的风险或影响的公众的生命及健康。必须杜绝在当地和国际认可的和指定的文化遗产、地质遗迹、森林保护区、湿地保护区、野生动物保护区等地区开采(除非在当地法律允许的情况下)。同时, 供应商不得采购来源自受到国际(包括但不限于联合国、欧盟、英国和美国等)制裁地区的原材料。

#### 风险缓解策略:

如果我们发现在一定程度上存在此类风险 (2.7-2.11), 将根据企业在供应链上所处的具体位置, 立即制定、采用和实施上游供应商及其他利益相关方风险管理计划, 从而使为破坏环境、侵犯人权、违反商业道德等风险得到遏制或降低。如果风险管理计划实施六个月未起作用, 我们将暂时中止或终止与上游供应商的合作。

园区将本着持续改进的原则, 将该政策融入园区管理体系及各相关部门职责。该政策也适用于园区的所有供应商, 园区将采取积极措施将政策传递给供应商, 政策自发布之日起生效, 并将在园区官方网站上公布。

#### 注释:

<sup>i</sup> 企业应参照联合国安理会有关决议对非国家武装团体进行识别。

<sup>ii</sup> “关联方”包括供应链上直接与武装团体合作, 为矿产开采、贸易、处理提供便利的贸易商、批发商、中间商及其他各方。

<sup>iii</sup> 对矿山、运输路线、矿产交易地、以及供应链上游行为主体进行“控制”是指 <sup>i</sup>) 对开采活动

进行监视,包括对进入矿区进行授权,以及/或对下游中间商、出口企业或国际贸易者的销售进行协调;ii) 在矿产开采、运输、贸易或销售过程中利用任何形式的强迫或强制劳动;或 iii) 在上游企业或矿山担任领导或管理人员,或是享有受益权或其他所有者权益。

iv 向矿山、运输路线、矿产交易地、或上游企业进行“勒索”是指以暴力或其他手段相威胁,通常以允许开采、使用运输路线、或矿产运输、购买、销售等活动作为筹码,向被勒索人索要并非其自愿支付的金钱或矿产。

v 此处所述“直接或间接支持”指的并不是合法形式的支持,合法形式包括企业向其经营所在国政府支付的法定税收、费用和/或特许开采费。

vi 例如《安全与人权自愿原则》等国际指导文件。

vii 实施风险计划中如若遇到海啸、地震、火灾、疫情、战争等不可抗力因素,可相应调整时间期限,但将对情况提供文字说明。

viii 对采用风险管理计划后需要降低的风险,企业应额外进行风险评估。若风险管理计划六个月内未取得明显效果,为公共或私人安全武装武装提供直接或间接支持的风险没有得到遏制或降低的话,企业应暂时停止与供应商的合作,时间至少是三个月,并在暂时中止合作的同时对风险管理计划进行修订,阐明合作关系恢复之前改进工作所应达到的绩效目标。

ix 参见经合组织《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》(1997)和《联合国反腐败公约》(2004)。